

Rencana Strategis (Renstra)

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan. melalui urutan pilihan. yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. kesempatan kerja. lapangan berusaha. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan Penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal;
- c. Penyusunan Rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan Rancangan Akhir; dan
- f. Penetapan.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Periode Tahun 2021-2026. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS RPJMD Bantul Tahun 2021-2024, dan Renstra Sekretariat Daerah DIY Tahun 2017-2022.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Selanjutnya, Renja PD akan menjadi pedoman penyusunan Rencan Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- f) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3)
- g) Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah DIY Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);

- h) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12)
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04);
- j) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5);
- k) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Periode Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.

- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program lingkup Sekretariat Daerah;
- b. perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan aparatur Pemerintah Daerah;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Sekretariat Daerah;
- g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Sekretariat Daerah;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi dan budaya pemerintahan pada Sekretariat Daerah;
- i. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat Daerah;
- j. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Daerah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten, yaitu :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan dan pengoordinasian, pembinaan , pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemerintahan, kerjasama, hukum dan kesejahteraan rakyat.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berkoordinasi dengan:

1) Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian. Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah , pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah

Bagian Administrasi Pemerintahan ini terdiri atas :

- a) Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama
- b) Subbagian Administrasi Kewilayahan
- c) Subbagian Otonomi Daerah

2) Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bagian. Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kesejahteraan Rakyat ini terdiri atas :

- a) Subbagian Bina Mental Spiritual
- b) Subbagian Kesejahteraan Sosial
- c) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat

3) Bagian Hukum

Bagian Hukum sebagaimana dipimpin oleh Kepala Bagian. Bagian Hukum mempunyai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administratif di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak azasi manusia serta dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Hukum ini terdiri atas :

- a) Subbagian Perundang-Undangan
- b) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
- c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, sumber daya alam dan pengadaan barang dan/ jasa.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan berkoordinasi dengan:

1) Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksaaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam.

Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam ini terdiri atas :

- 1) Subbagian Perekonomian
- 2) Subbagian Administrasi Pembangunan
- 3) Subbagian Sumber Daya Alam

2) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksaaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ini terdiri atas :

- 1) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- 2) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- 3) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

3. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang adminitrasi umum. Asisten Administrasi Umum berkoordinasi dengan:

1) Bagian Umum dan Protokol

Bagian Umum dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah , pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksaaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang tata usaha, protokol, komunikasi pimpinan dan rumah tangga serta perlengkapan.

Bagian Umum dan Protokol ini terdiri atas :

- 1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli
- 2) Subbagian Protokol
- 3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

2) Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administratif bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.

Bagian Organisasi ini terdiri atas :

- 1) Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan
- 2) Subbagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
- 3) Subbagian Kinerja Dan Reformasi Birokrasi

3) Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan Sekretariat Daerah.

Bagian Perencanaan dan Keuangan ini terdiri atas :

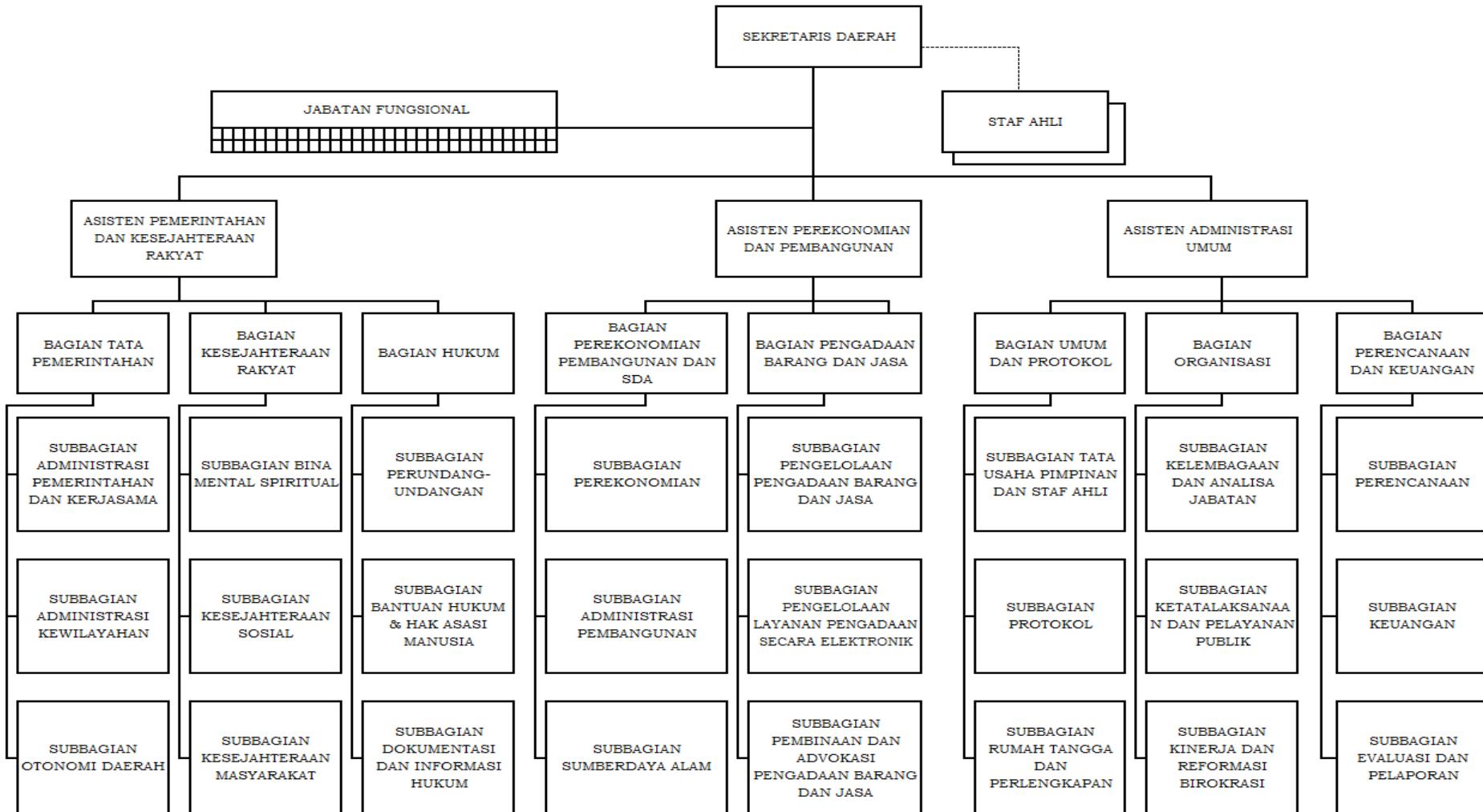
- 1) Subbagian Perencanaan
- 2) Subbagian Keuangan
- 3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional bertugas membantu Sekretaris Daerah di bidang tertentu sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul



Keterangan :
 — : garis komando
 : garis koordinasi

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

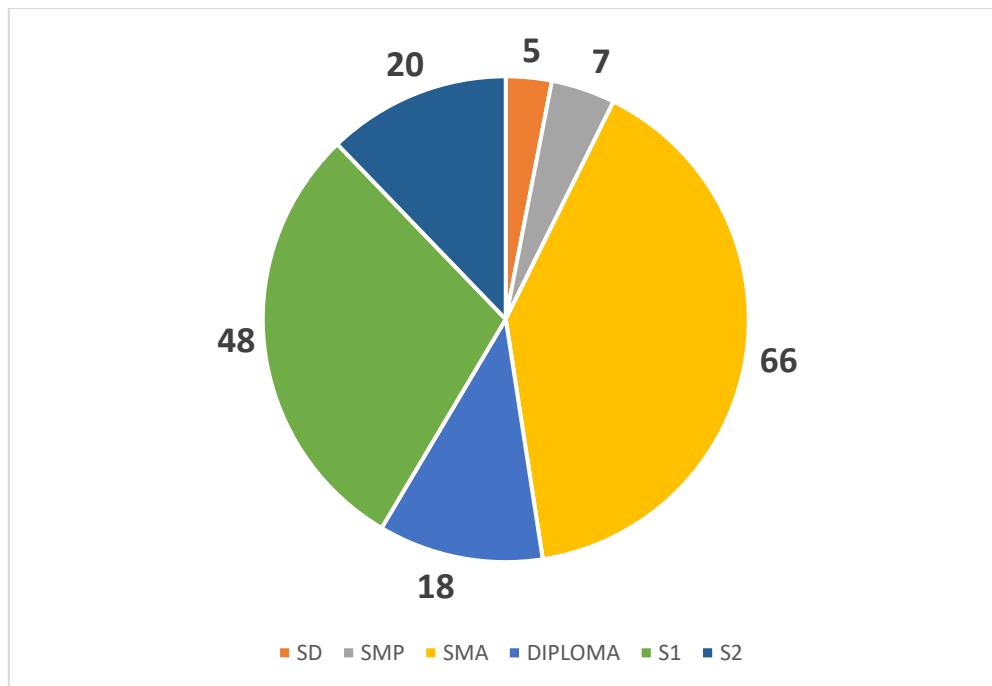
2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Daerah per 31 Desember 2020 sebanyak 164 orang, terdiri dari 118 orang laki-laki (71,95%) dan 46 orang perempuan (28,75 %).

Sedangkan berdasarkan pendidikan, Sumber Daya Manusia di Sekretariat Daerah didominasi oleh jenjang pendidikan SD sebanyak 5 orang, SLTP 7 Orang, SMA sebanyak 66 orang, Diploma 18 orang dan jenjang pendidikan S1 sebanyak 48 orang, dan S2 sebesar 20 orang.

Untuk SDM berdasarkan Jumlah pejabat eselon sebanyak 43 personil terdiri dari eselon II/a sebanyak 1 orang, II/b sebanyak 3 orang, dan eselon III/a, sebanyak 9 orang. Untuk eselon IV/b yaitu Kasubag di Bagian Sekretariat Daerah sebanyak 30 Orang.

**Gambar 2.2
Jumlah Personil di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2021**



Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 2021.

NO	NAMA ASET	JUMLAH	KETERANGAN	PENGAMPU
1	2	3	4	5
26	Kursi Tamu	5	Baik	
27	Lap Top	6	Baik	
28	LCD Monitor	1	Baik	
29	LCD Projector/Infocus	1	Baik	
30	Lemari Besi/Metal	1	Baik	
31	Lemari Es	1	Baik	
32	Lemari Kayu	12	Baik	
33	Meja Kerja Kayu	28	Baik	
34	Meja Komputer	3	Baik	
35	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	1	Baik	
36	MEUBELAIR Lain-lain	4	Baik	
37	Microphone/Wireless MIC	1	Baik	
38	Note Book	3	Baik	
39	P.C Unit	18	Baik	
40	Papan Tulis	2	Baik	
41	Partisi	1	Baik	
42	Photo Tustel	2	Baik	
43	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	Baik	
44	Rak Besi	1	Baik	
45	Rak Kayu	2	Baik	
46	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	Baik	
47	Rol Meter	1	Baik	
48	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	Baik	
49	Sepeda Motor	2	Baik	
50	Server	1	Baik	
51	Stabilisator	1	Baik	
52	Station Wagon	1	Baik	
53	Tabung Gas	1	Baik	
54	Televisi	1	Baik	
55	Uninterruptible Power Supply (UPS)	12	Baik	
56	Wireless	1	Baik	
JUMLAH		246		

Sumber : Sekretariat Daerah, 2021

2.3. Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah mendasarkan pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021 – 2026. Capaian Nilai capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah pada tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2016 – 2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	80	82	83	80	81	82	73,66	77,9	81.39	81.91	80.92	N/A	92.08	95.00	98.06	102.39	99.90	N/A
2	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,4196	3,2641	3,4463	3,9815*	N/A	N/A	103.62	96.00	98.47	110.60	N/A	N/A
3	Nilai Evaluasi Kinerja	65	70	72	70	71	72	58,93	63,79	76.19	76.16	N/A	N/A	90.66	91.13	105.82	108.80	N/A	N/A
4	Persentase belanja pegawai	53	51	49	48	45	45	59.22	43.12	43.46	47.37	43	N/A	111.74	84.55	88.69	98.69	95.56	N/A
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	80	81	82	83	84	78.78	87.57	88.70	86.97	88.03	N/A	99.72	109.46	109.51	106.06	106.06	N/A

Sumber : Sekretariat Daerah, 2021 (diolah)

Dari Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretaris Daerah diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang cukup baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah nilai 81 (kategori A). realisasi mendapatkan nilai 80.92 (kategori A) atau bernilai kinerja Sangat Baik.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Bantul tahun 2020 sebesar 80.92 dengan kategori A, mengalami penurunan nilai dari tahun 2019.

Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul, diantaranya nilai dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, Pencapaian Kinerja.

Capaian tahun 2020 ini telah menyumbangkan 98.68 % dari target akhir Renstra tahun 2021.

2. Terget capaian tahun 2019 sebesar 3,6 dan terealisasi sebesar 3,9815 Nilai ini mengalami peningkatan dari tahun 2018 dikarenakan pemenuhan dalam sistem penilaiannya yang menggunakan data pendukung yang disajikan sesuai dengan EPPD yang dilaporkan.

Capaian tahun 2019 ini menyumbang 102 % dari target akhir renstra tahun 2021.

3. Capaian Nilai Evaluasi Kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Mulai dari tahun 2018, semua terealisasi diatas target yang sudah ditetapkan sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2020 evaluasi kinerja tidak dilakukan karena kondisi Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Bantul, sehingga banyak kegiatan dan anggaran yang tidak dapat direalisasikan karena kondisi tersebut. Capaian tahun 2019 ini menyumbangkan 105,7% terhadap target akhir renstra tahun 2021.

4. Capaian Realisasi tertinggi pada tahun 2017, yaitu dengan target 51 % terealisasi sebesar 43,12 %. Capaian pada presentase belanja pegawai ini bersifat *invert*, atau semakin sedikit nilai presentase capaian, maka semakin bagus. Sekretaris Daerah merupakan koordinator pengelolaan keuangan daerah, sehingga persentase belanja pegawai ini masuk kedalam IKU Sekretariat Daerah.

5. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kabupaten Bantul dari tahun 2017 sampai tahun 2021 realisasi mencapai target yang telah ditentukan.

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Publik (UPP), baik pelayanan langsung maupun tidak langsung. Dari tren kenaikan nilai Indeks kepuasan masyarakat ini menggambarkan persepsi pengguna layanan terhadap kinerja layanan publik di kabupaten Bantul semakin membaik. Capaian tahun 2020 ini menyumbangkan 104,7% terhadap target akhir renstra tahun 2021.

a. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, faktor pendorong yang dipunyai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Komitmen kepala Perangkat Daerah dan jajarannya terhadap keselarasan kinerja, pencapaian sasaran dan indicator sudah terbentuk
- b. Perubahan regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat sangat dinamis
- c. Penyelenggaraan Transaksi Non Tunai di Kabupaten Bantul akan merubah sistem penatausahaan Keuangan yang lebih efisien dan efektif
- d. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah Kabupaten Bantul merupakan modal bagi penyelenggaraan pemerintahan yang kompeten, akuntabel dan transparan.

Sedangkan faktor penghambat bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya analisis dan monitoring serta evaluasi terhadap pencapaian kinerja utama.
- b. Adanya kasus pandemi Covid-19 dimana beberapa kegiatan yang ada ditunda atau tidak boleh dilaksanakan.

2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

**Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Sekretariat Daerah Bantul Tahun 2016-2021**

URAIAN SUMBER KEUANGAN	TARGET ANGGARAN						REALISASI						RASIO REALISASI DAN ANGGARAN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.395 .410.9 00	11.771 .292.1 82	11.838 .785.7 52	11.675. 902.200	12.451 .214.6 24		12.010 .964.4 23	10.672 .024.2 78	10.946 .207.0 08	11.016 .542.3 53	10.364 .581.8 80	-	96,90	90,66	92,46	94,35	83,24	-
BELANJA LANGSUNG	24.726 .915.6 92	28.109 .260.5 85	30.040 .305.6 70	27.469. 393.185	16.826 .635.8 64		21.005 .294.4 50	24.983 .656.7 99	26.110 .723.4 84	25.546 .503.8 58	14.816 .242.8 37	-	84,95	88,88	86,92	93,00	88,05	-
BELANJA PEGAWAI	1.368. 314.40 0	1.005. 237.40 0	1.811. 131.90 0	2.836.6 82.400	3.564. 374.50 0		1.182. 827.40 0	851.43 9.400	1.700. 370.80 0	2.791. 878.00 0	3.429. 739.00 0	-	86,44	84,70	93,88	98,42	96,22	-
BELANJA BARANG DAN JASA	17.030 .093.2 92	22.729 .101.1 85	24.943 .502.7 70	23.083. 064.285	12.261 .095.7 29		14.584 .826.2 00	20.510 .936.4 24	22.168 .774.1 37	21.315 .152.2 20	10.410 .020.3 42		85,64	90,24	88,88	92,34	84,90	-
BELANJA MODAL	6.328. 508.00 0	4.374. 922.00 0	3.285. 671.00 0	1.549.6 46.500	1.001. 165.63 5		5.237. 640.85 0	3.621. 280.97 5	2.241. 578.54 7	1.439. 473.63 8	976.48 3.495	-	82,76	82,77	68,22	92,89	97,53	-
BELANJA:																		
BELANJA OPERASI						47.638 .298.8 02						N/A						N/A
BELANJA MODAL						598.22 1.500						N/A						N/A

Sumber: BKAD Kabupaten Bantul, 2021

Dilihat dari tabel diatas, maka pada dasarnya nilai rasio realisasi dan anggaran cukup baik. Pada Tahun 2020, pada realisasi belanja langsung cenderung rendah disebabkan adanya regulasi (Surat Edaran Bupati maupun Surat Edaran Sekretaris Daerah) karena situasi pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan dilaksanakan atau ditundanya suatu kegiatan yang sudah direncanakan di tahun sebelumnya.

Penundaan atau pelarangan pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya; perjalanan dinas dalam dan luar daerah, pembangunan fisik, dan kegiatan lain yang sifatnya sosialisasi, serta pengumpulan massa.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan :

- a. Adanya perubahan paradigma terhadap pelayanan umum pemerintahan perlu ditindaklanjuti dengan dengan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan yang kompeten, akuntabel, efektif, dan transparan;
- b. Tuntutan masyarakat terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur;
- c. Tuntutan akan pengadaan Barang/jasa yang efektif dan efisien;
- d. Pertumbuhan sektor perekonomian terutama BUMD harus bisa mengimbangi akselerasi percepatan dan inovasi program pembangunan daerah; dan
- e. Tuntutan reformasi birokrasi untuk mewujudkan kelembagaan daerah yang efektif dan efisien serta SDM yang unggul.

Sedangkan peluang bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Komitmen pimpinan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang berkualitas;
- b. Peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum bagi masyarakat;
- c. Adanya regulasi dari pusat yang jelas tentang kelembagaan perangkat daerah.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah	Keterangan
1	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal	Waktu penyampaian EPPD belum sesuai target.	Ketidaksiapan data oleh OPD	Bagian Administrasi Pemerintahan
		Adanya konflik perbatasan kabupaten	Batas wilayah administrasi kabupaten yang belum jelas	
		Regulasi terkait kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul belum sepenuhnya dipahami	Kurangnya sosialisasi regulasi dan lingkup kerjasama antara stakeholder dengan Pemerintah Daerah	
2	Kelembagaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi orgasasi perangkat daerah belum optimal	Paradigma proses bisnis belum menjadi dasar pertimbangan dalam pembentukan SOTK perangkat daerah	Dasar penyusunan SOTK belum mempertimbangkan keterkaitan dengan dokumen perencanaan Penyusunan Program dan kegiatan pada perangkat daerah masih berdasarkan pada kebiasaan yang lampau.	Bagian Organisasi
			Tumpang tindih/ <i>Overlapping</i> pelaksanaan program dan kegiatan di antara Perangkat Daerah	

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah	Keterangan
			Pemahaman ASN terhadap <i>core bisnis</i> dan tujuan Perangkat Daerah masih kurang	
		Duplikasi tugas dan fungsi perangkat daerah	Pembagian klaster tugas dan fungsi antar perangkat daerah yang tidak jelas. Uraian fungsi yang masih sangat umum dan tidak merinci secara jelas sehingga menimbulkan penafsiran berbeda	
			Perangkat daerah mempunyai sasaran yang sama tetapi berbeda tujuan dalam pentahapannya	
			Program dan kegiatan yang dilaksanakan sama tanpa mempertimbangkan output yang akan dicapai	
3	Pelaksanaan/ implementasi kebijakan perekonomian daerah yang belum ditindaklanjuti secara serius	Kajian terkait kebijakan perekonomian belum dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya BUMD	kuantitas maupun kualitas dokumen akademis dan monev kebijakan perekonomian daerah masih kurang baik Data-data kinerja Lembaga Keuangan Mikro belum terpantau dan tersedia dengan baik	Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA
			Belum adanya regulasi kuat terkait tindak lanjut hasil analisis kebijakan perekonomian yang harus diaplikasikan kepada lembaga perekonomian BUMD	

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah	Keterangan
		Hasil kebijakan pembangunan masih belum termonitor dengan baik	Hasil kajian analisis terkait kebijakan pembangunan belum diaplikasikan dengan baik	Kurangnya komunikasi antara pemangku kebijakan pembangunan dengan tim analisa kebijakan pembangunan
				Regulasi terkait kebijakan pembangunan belum mampu mengatur proses pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien
4	Pengelolaan Pengadaan Barang/jasa belum optimal	Perencanaan pengadaan barang/jasa di OPD belum sepenuhnya memperhatikan waktu proses pengadaan	Inventarisasi kebutuhan paket pengadaan barang/jasa belum optimal	Bagian Layanan Barang dan Jasa
5	Pengelolaan Pengadaan Barang/jasa belum optimal Pelaksanaan/ implementasi kebijakan kesejahteraan rakyat yang belum ditindaklanjuti secara serius	Pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik belum optimal	Pengelolaan seluruh system informasi PBJ dan infrastrukturnya harus dilaksanakan oleh UKBPJ	Bagian Layanan Barang dan Jasa Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
		Pengendalian PBJ pemerintah belum terlaksana secara menyeluruh	Pengendalian masih dilakukan secara sektoral	
		Pemetaan anggaran paket pekerjaan LPBJ kurang efektif dan efisien	Aplikasi pendukung belum terintegrasi dengan aplikasi perencanaan dan penatausahaan keuangan daerah	
		Kompetensi SDM pengadaan barang/jasa kurang	Jumlah personil bersertifikat PBJ kurang	
		Kebijakan kesejahteraan rakyat belum optimal dijadikan acuan untuk meningkatkan	Belum optimalnya monitoring, evaluasi dan analisis pengembangan kebijakan	

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah	Keterangan
		kesejahteraan masyarakat	kesejahteraan rakyat	
6	Pembentukan produk hukum daerah belum optimal	Belum optimalnya harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah	Peraturan perundang-undangan yang sangat dinamis	Bagian Hukum
			Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait	
			Perbedaan pemahaman dan penafsiran aturan hukum	
			Tuntutan kualitas pelayanan yang semakin tinggi	
7	Kualitas pelayanan belum optimal	Belum optimalnya dukungan pelayanan kepada Kepala Daerah dan tugas pemerintahan	Tingkat beban kerja pelayanan makin besar seiring dengan kecepatan layanan berbasis teknologi Informasi belum diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM	Bagian Umum dan Protokol
			Sarana protokoler belum memanfaatkan teknologi informasi dengan maksimal	
8	Kualitas Perencanaan belum optimal	Belum maksimalnya koordinasi antar unit Bagian Sekretariat Daerah dalam keterlibatan proses perencanaan	Keterbatasan waktu koordinasi karena kesibukan kegiatan tupoksi masing-masing unit Bagian Sekretariat Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika Indonesia (NKRI)”

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara tepat dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian **misi ke- 1 “Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima”**.

Hasil telaahan visi, misi diatas, maka dapat disimpulkan beberapa faktor pendorong dan penghambat pelayanan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, diantaranya;

Tabel 3.2
**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sekretariat Daerah terhadap
Pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati**

NO	MISI KE-1	PROGRAM BUPATI-WAKIL BUPATI	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1.	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	<p>Program unggulan 1: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan menghadirkan pelayanan publik prima, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur; b) Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan; dan c) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkna layanan publik yang mudah, cepat dan akurat. 	<p>Peraturan yang mengatur tentang kelembagaan Perangkat Daerah telah terintegrasi kedalam peraturan yang engantur tentang perencanaan program dan keuangan. Sehingga keselarasan dalam penataan penyusunan fungsi struktur organisasi dapat tercapai</p> <p>Komitmen pimpinan terhadap pencapaian target realisasi baik perencanaan sampai akuntabilitas kinerja semakin tinggi</p> <p>Kemajuan Teknologi Informasi di Kabupaten Bantul semakin pesat</p>	<p>masih lemahnya fungsi pengendalian, pemantauan, dan pengawasan terhadap tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah</p> <p>Aplikasi yang wajib digunakan (SIPD) belum sepenuhnya terintegrasi serta belum menjawab kebutuhan daerah</p> <p>Belum sepenuhnya kemajuan TI diterapkan dan teraplikasi di Unit Bagian Sekretariat Daerah</p>

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Berdasarkan hasil telaahan, tidak ada kementerian/Lembaga yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Oleh sebab itu, tidak dilakukan telaahan terhadap renstra K/L.

3.3.1. Telaahan Renstra Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Renstra Sekretariat Daerah yang terkait yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah Bagian Organisasi dan Bagian Hukum. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam telaah Rencana Strategis digunakan Dokumen Perubahan

Renstra 2017 – 2022 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan untuk Bagian Hukum, digunakan Dokumen Perubahan Renstra 2017 – 2022 Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun isu strategis, tujuan, sasaran, serta indikator tujuan dan sasaran Renstra Setda DIY yang terkait dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
BIRO ORGANISASI			
a. Dinamika Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Pusat b. Optimalisasi pelayanan publik c. Digital Government Services d. Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan e. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah f. Percepatan Reformasi Birokrasi g. Kewenangan Keistimewaan	Menjadi institusi pendorong terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis melalui reformasi birokrasi	Terwujudnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien
		Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik	Jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik pada zona hijau
BIRO HUKUM			
a. Perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah yang selaras dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesesuaian b. Optimalisasi penyusunan Naskah Akademik dan hasil kajian sebagai bahan kebijakan untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah. c. Peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih terbatas, terutama untuk perancang peraturan	Terwujudnya layanan hukum yang berkualitas melalui pembentukan produk hukum daerah, pelayanan bantuan hukum, dan informasi produk hukum yang terencana	Meningkatnya kualitas produk hukum	Presentase jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
perundang-undangan dan analis permasalahan hukum			
		Meningkatnya kualitas produk hukum, layanan hukum, dan layanan informasi produk hukum	Presentase kualitas bantuan produk hukum, dan layanan informasi produk hukum yang baik

Faktor-faktor pendorong dan penghambat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sekretariat Daerah ditinjau dari Sasaran Renstra Provinsi DIY

No	Sasaran Renstra DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
I.	BIRO ORGANISASI		
	5. Terwujudnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah	Peraturan yang mengatur tentang kelembagaan Perangkat Daerah telah terintegrasi kedalam peraturan yang engantur tentang perencanaan program dan keuangan.	masih lemahnya fungsi pengendalian, pemantauan, dan pengawasan terhadap tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
	6. Meningkatnya kepatuhan Penyelenggaraan pelayanan publik	Kebijakan yang mendukung kepatuhan pelayanan publik	Belum meratanya kualitas kepatuhan pelayanan publik
II.	BIRO HUKUM		
1	Meningkatnya kualitas produk hukum	Koordinasi dan komitmen dengan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul terkait produk hukum sudah terjalin dengan baik	Pelatihan <i>legal drafting</i> terkait penyusunan <i>draft</i> produk hukum belum maksimal.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

Penyusunan rencana pembangunan disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan. sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang wilayah untuk mewujudkan pusat pelayanan pemerintah Kabupaten yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan. perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Kabupaten Bantul sebagai wilayah menjadi perhatian penting.

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian.

Program dan kegiatan pendukung Pengembangan Struktur Ruang bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul terdiri dari :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	PENGAMPU
1	Pemantapan dan pengembangan sistem pelayanan wilayah	Penyusunan PERDA tentang Pedagang Kaki Lima (PKL)	-	Bagian Hukum

3.4.2. Telaahan KLHS

Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaah dan analisis dokumen ini berdasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024.

Sesui dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024, maka Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Telaah Rekomendasi KLHS

INDIKATOR TPB	ARAHAN HASIL KLHS	REKOMENDASI PROGRAM HASIL KLHS	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG	KETERANGAN
Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	-	Menjadi 80%	-	-	TPB Tercapai
Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	-	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%	-	-	TPB Tercapai

INDIKATOR TPB	ARAHAN HASIL KLHS	REKOMENDASI PROGRAM HASIL KLHS	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG	KETERANGAN
Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	-	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80%	-	-	TPB Tercapai

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Tahun 2021-2026

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya. maka diperoleh isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah.
2. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat.
3. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administratif di bidang perundangan, bantuan hukum dan hak azasi manusia serta dokumentasi dan informasi hukum.
4. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam.
5. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

6. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksaaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang tata usaha, protokol, komunikasi pimpinan dan rumah tangga serta perlengkapan.
7. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administratif bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.
8. Peningkatan kualitas penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan Sekretariat Daerah.

BAB IV.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	KONDISI AWAL RENSTRA 2021 5	TARGET					KONDISI AKHIR RENSTRA
					2022	2023	2024	2025	2026	
					6	7	8	9	10	
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	4,0815	4,1315	4,1815	4,2315	4,13815	4,3315	4,3315
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten	80,92 Angka	80,95 Angka	81,20 Angka	81,45 Angka	81,70 Angka	81,95 Angka	81,95 Angka
			2. Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			3. Persentase rancangan perda dan perkada yang diharmonisasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			4. Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			5. Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	90 %	90 %	93 %	94 %	95 %	100 %	100 %
			6. Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			7. Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	85	85 %	85 %	85 %	90 %	90 %	90 %

BAB V.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Sekretariat Daerah

Visi	: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal IkaIndonesia (NKRI)
Misi 1	: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENANGGUNGJAWAB
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	<p>a. Meningkatkan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>b. Meningkatkan kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>a. Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</p>	<p>Peningkatan kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Peningkatan kuantitas Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan unit Bagian Sekretariat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah • Dokumentasi serta pengelolaan informasi produk hukum melalui pos pelayanan hukum pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kab. Bantul (jdih.bantulkab.go.id) • Pemberian bantuan hukum atas perkara perdata dan tata usaha negara serta fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum 	Bagian Perencanaan dan Keuangan Bagian Hukum

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENANGGUNGJAWAB
		a. Optimalisasi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Koordinasi pelaksanaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa. • Eningkatkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, serta • Optialisasi Sosialisasi, pendapingan, serta Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 	Bagian LPBJ
		a. Meningkatkan kinerja Administrasi Pemerintahan Tata	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi Penataan Administrasi Pemerintahan serta Pengelolaan Administrasi Kewilayahannya 	Bagian Tata Pemerintahan
		b. Meningkatkan fasilitasi kerjasama daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi serta evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasaa daerah aupun luar negeri 	
		a. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual • Peningkatan Pelayanan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
		a. Mewujudkan Organisasi Penataan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan • Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi serta Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 	Bagian Organisasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENANGGUNGJAWAB
		<p>a. Pelaksanaan Perekonomian</p> <p>Kebijakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, serta Kebijakan Pendirian BUMD • Peningkatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil • Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan bidang perhubungan, lingkungan hidup, peruahan perukian. 	Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

Visi	: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal IkaIndonesia (NKRI)
Misi 1	: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima
Tujuan	: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel
Sasaran	: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

1. Bagian Tata Pemerintahan

Strategi:

- a. Meningkatkan kinerja Administrasi Tata Pemerintahan
- b. Meningkatkan fasilitasi kerjasama daerah

Arah Kebijakan:

- a. Optimalisasi Penataan Administrasi Pemerintahan serta Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
- b. Fasilitasi serta evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasaa

Urusan:

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan:

Sekretariat Daerah

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan		Percentase Ketersediaan Dokumen Data Pendukung LPPD Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Persen	100	1.043.927.600	100	1.057.394.000	100	1.071.352.000	100	1.085.280.000	100	1.099.172.000
					100	1.004.852.600	100	1.014.412.000	100	1.023.672.000	100	1.034.832.000	100	1.043.680.000
	4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan	-Laporan Rakor Forkopimcam	Dokumen	2	5.700.000	2	5.700.000	2	6.250.000	2	6.875.000	2	7.560.000	
					12	720.000.000	12	720.000.000	12	720.000.000	12	720.000.000	12	720.000.000
		-Laporan rakor rutin bidang pemerintahan	Dokumen	2	51.556.750	2	56.072.000	2	56.072.000	2	59.472.000	2	62.419.000	
		-Pemahaman peserta bimtek pembakuan rupa bumi sebanyak 80 % dari 115 orang	OH	150	6.400.000	150	6.400.000	150	6.400.000	150	7.040.000	150	7.740.000	
		-Penandaan lokasi pilar batas secara geodetik (perbatasan Seloharjo-Girijati-Giritirto)	Titik lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.01.02.2.01.03	-Dokumen LPPD	Dokumen	1	64.695.850	1	65.343.000	1	72.464.000	1	77.710.000	1	80.853.000	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
4.01.01 PRO GRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-Dokumen SPM	Dokumen	1	6.500.000	1	10.897.000	1	12.486.000	1	13.735.000	1	15.108.000	
			OH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			OH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Media	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	
	4.01.02.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah	Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah	persen	100	39.075.000	100	42.982.000	100	47.680.000	100	50.448.000	100	55.492.000	
			OH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-Evaluasi Kerjasama	Dokumen	25	39.075.000	25	42.982.000	25	47.680.000	25	50.448.000	25	55.492.000	
			OH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-Jumlah perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	Dokumen	25	39.075.000	25	42.982.000	25	47.680.000	25	50.448.000	25	55.492.000
		-Workshop Kerjasama	OH	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NIlai AKIP (Bag.Administrasi Pemerintahan)	angka	83	142.036.900	83	158.036.900	83	180.036.900	83	216.036.900	83	292.036.900	
		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen	100	22.478.100	100	38.478.100	100	56.399.000	100	85.828.400	100	144.855.000	
	4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Fotokopi	lembar	18260	4.565.000	18260	4.565.000	18.300	4.575.000	18.400	4.600.000	18.800	4.700.000	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
4.01.01.2.0 6.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Cetak	jenis	3	5.799.000	3	5.799.000	3	5.799.000	3	5.799.000	3	6.400.000	
	4.01.01.2.0 6.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar/Majalah	jenis											
	4.01.01.2.0 6.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Dalam daerah	OP			25	16.000.000	25	32.700.000	67	47.075.000	75	72.500.000	
	4.01.01.2.0 6.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Luar daerah	OP							3	13.600.000	8	40.550.000	
	4.01.01.2.0 6.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	jenis	14	12.114.100	14	12.114.100	14	13.325.000	14	14.754.400	14	20.705.000	
	4.01.01.2.0 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	persen	100	83.238.800	100	83.238.800	100	85.500.900	100	88.256.500	100	98.034.400	
	4.01.01.2.0 8.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan meterai	lembar	250	2.500.000	250	2.500.000	260	2.500.000	260	2.750.000	325	3.250.000	
		Pengiriman dokumen	Kali	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	550.000	1	600.000	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
		4.01.01.2.0 8.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat kebersihan kantor	jenis	10	2.788.800	10	2.788.800	10	3.065.000	10	3.371.500	10	5.710.000
			Alat listrik	jenis	4	990.000	4	990.000	4	1.125.900	4	1.240.000	4	1.890.900
			Pemeliharaan peralatan dan mesin	jenis	7	18.500.000	7	18.500.000	7	20.350.000	7	22.385.000	7	28.623.500
			Pemeliharaan AC	unit										-
			Pemeliharaan Komputer	unit										-
			Pemeliharaan Laptop	unit										-
		4.01.01.2.0 8.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	ob	108	57.960.000	108	57.960.000	108	57.960.000	108	57.960.000	108	57.960.000
			Pengadaan rak arsip	unit										-
		Pengadaan notebook	unit											-
	4.01.01.2.0 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD		persen	100	36.320.000	100	36.320.000	100	38.137.000	100	41.952.000	100	49.147.500
			Kendaraan Dinas roda 2	unit	3	17.745.000	3	17.745.000	3	18.633.000	3	20.497.000	3	25.547.000
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.0 9.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kendaraan dinas roda 4	unit	1	18.575.000	1	18.575.000	1	19.504.000	1	21.455.000	1	23.600.500

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
		Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Persen	87,5	261.050.000	88,0	261.050.000	88,5	261.050.000	89,0	261.050.000	89,5	261.050.000	
		Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	Persen	87,5	261.050.000	88,0	261.050.000	88,5	261.050.000	89,0	261.050.000	89,5	261.050.000	
		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan kalurahan/kelurahan	Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan	Dokumen	8	2	2	1	1	1	1	2	1	
		Sosialisasi pelaksanaan urusan keistimewaan di kapanewon	Kali	1										
JUMLAH TOTAL					1.447.014.500		1.476.480.900		1.512.438.900		1.562.366.900		1.652.258.900	

2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Strategi:

Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Arah Kebijakan:

- Peningkatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
- Peningkatan Pelayanan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

Urusan:

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan:

Sekretariat Daerah

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA			NILAI AKIP	Angka	83	381.037.080	83	397.037.080	83	419.037.080	83	455.037.080	83	531.037.080
	4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	150.826.500	100	153.541.600	100	159.541.600	100	179.900.000	100	226.541.600
	4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	Jenis	5	1.030.500	7	1.100.000	8	1.200.000	10	1.500.000	10	2.500.000	
	4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	Jenis	3	3.000.000	3	4.500.000	3	5.000.000	3	5.500.000	3	7.500.000	
		Penggandaan	Lembar	8000		8000		10000		12000		14000		

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
		Pelayanan Kantor	Laporan Administrasi Pelayanan Umum Perkantoran	Dokumen	1		3		3		3		3	
			Pengelola Keuangan dan BMD	OB										
			Honorarium Penanggung jawaban pengelola keuangan	OB	96		96		96		96		96	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Persen	100	62.300.000	100	72.500.000	100	82.500.000	100	90.000.000	100	112.500.000	
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak Kendaraan	Unit	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Unit	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase Kebijakan dan fasilitasi kegiatan kesejahteraan Rakyat Yang	Persen	100	7.686.962.700	100	7.786.125.000	100	7.888.902.000	100	7.991.458.000	100	8.093.749.000	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026					
					TARGET	PAGU (Rp)												
	4.01.02.2.0 2 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Ditindaklanjuti																
		Capaian Kinerja Pelaksanaan Kebijakan Kesra	Persen	100	7.686.962.700	100	7.786.125.000	100	7.888.902.000	100	7.991.458.000	100	8.093.749.000					
		4.01.02.2.0 2.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Tempat Ibadah Yang Mendapatkan Fasilitasi Sarana Prasarana	Lokasi	53	7.461.865.800	20	7.441.125.000	25	7.533.902.000	30	7.616.458.000	45	7.658.749.000				
		Laporan Fasilitasi Bina Mental Spiritual Baznas	Dokumen	2	2		2		2		2	2	2					
		Laporan Pelaksanaan Baznas	Dokumen															
		Laporan Kegiatan Pengeluaran Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	1		1		1		1	1	1					
		Acara Keagamaan	kali				95		100		100	100	100					
		Pemberdayaan Anak Yatim Piatu	Anak	3750	3800				3900		4000	4000	4000					
		Pemberdayaan Kaum Rois	Orang		2.700		2800		2900		3000	3000						
		4.01.02.2.0 2.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian	Kajian Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan dan	Dokumen	1	105.302.600	1	135.000.000	2	200.000.000	1	150.000.000	2	205.000.000				

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
		Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kependudukan											
		Monitoring Evaluasi Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan dan Kependudukan	Dokumen	2			2		2		2		2	
	4.01.02.2.0 2.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kajian Kebijakan Pengembangan Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Kesehatan	Dokumen	1	119.794.300	2			1		2		2	
		Monitoring, Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Kesehatan	Dokumen	3		3			3		3		3	
	JUMLAH TOTAL				8.067.999.780		8.183.162.080		8.307.939.080		8.446.495.080		8.624.786.080	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas	OP	160		180		200		250		250	
	4.01.01.2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	persen	100	100.000.000	100	103.078.200	100	106.578.200	100	111.078.200		124.078.200
	4.01.01.2.0 8.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai	lembar	300	3.000.000	350	3.000.000	350	3.500.000	350	3.500.000	350	3.500.000
	4.01.01.2.0 8.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK	jenis	25	46.000.000	30	48.078.200	30	50.078.200	30	52.578.200	30	60.578.200	
		Jumlah alat kebersihan	jenis	5		6		6		6		6		
		jumlah pemeliharaan rutin/berkala	jenis	5		5		5		5		5		
	4.01.01.2.0 8.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah pengelolaan Keuangan	orang	120	51.000.000	120	52.000.000	120	53.000.000		55.000.000	120	60.000.000	
										120				
	4.01.01.2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	27.000.000	100	30.000.000	100	35.000.000	100	40.000.000	100	50.000.000	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
	Urusan Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.0 9.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas	unit	5	27.000.000	5	30.000.000	5	35.000.000	5	36.000.000	5	50.000.000
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			Prosentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	persen	100	442.575.000	100	448.284.000	100	454.201.000	100	460.106.000	100	465.995.000
	4.01.02.2.0 3 Fasilitas dan Koordinasi Hukum		Capaian kinerja fasilitas dan koordinasi hukum	persen	100	442.575.000	100	448.284.000	100	454.201.000	100	460.106.000	100	465.995.000
		4.01.02.2.0 3.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Raperda	dokumen	12	184.575.000	12	188.284.000	12	188.701.000	12	190.000.000	12	190.000.000
			Jumlah Kajian NA	dokumen	1		1		1		1		1	
			Jumlah pengawasan produk hukum	desa	0		-		-		-		-	
			Jumlah publikasi Raperda	tayang	2		4		6		6		6	
			Jumlah Publik Hearing	angkatan	4		4		4		4		4	
			Jumlah SK	dokumen	500		500		500		500		500	
			Jumlah Perbup	dokumen	150		150		150		150		150	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
		4.01.02.2.0 3.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah embiro kadarkum	kelompok	4	183.000.000	4	185.000.000	4	188.000.000	4	190.106.000	4	195.000.000
			Jumlah forum RANHAM	angkatan	1		1		1		1		1	
			jumlah bantuan hukum non litigasi	permasalahan	5		5		5		5		5	
			jumlah bantuan hukum litigasi	kasus	5		4		5		5		5	
			jumlah pendampungan bantuan hukum	kasus	5		5		5		5		5	
			jumlah penyuluhan hukum	angkatan	4		4		4		4		4	
		4.01.02.2.0 3.03 Pendokumentasi Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	jumlah pendokumentasi produk hukum	dokumen	650		650		650		77.500.000	650	80.000.000	80.995.000
			jumlah penerbitan LD	eksemplar	150		150		150		150	650		
			pemahaman peserta sosialisasi	orang	200		200		200		200	150		
			pembinaan petugas JDI	orang	100		100		100		100	200		
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan		Prosentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	persen	88	500.000.000	88,8	500.000.000	89	500.000.000	89,5	500.000.000	90	500.000.000	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
Ketatalaksanan n	4.01.04.2.0 1 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kab/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	persen	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000
				dokumen	1	500.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000
			Peraturan Bupati	dokumen	4		4		4		4		4	
			Kajian Penyesuaian Regulasi Tindak Lanjut Keistimewaan	dokumen	1									
			Bimtek Penyusunan Perkal	orang	300									
		Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Sosialisasi Perbup	orang		300		300		300		300		300
			Bimtek Penyusunan Perkal	orang			300	250.000.000	300	250.000.000	200	250.000.000	200	250.000.000
			Laporan Penyelarasan Produk Hukum Kaluran	dokumen			1		1		1		1	
			Monitoring dan evaluasi Produk	kalurahan			75		75		75		75	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
		Hukum Kalurahan												
JULAH TOTAL						1.161.653.200		1.183.362.200		1.211.279.200		1.253.184.200		1.335.073.200

4. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Strategi:

Meningkatkan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Arah Kebijakan:

Peningkatan kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Urusan:

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan:

Sekretariat Daerah

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	19.551.226.356	83	19.633.749.506	83	19.822.043.506	83	20.000.837.506	83	20.239.754.506	
		Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	37.765.700	100	37.765.700	100	60.500.000	100	68.383.400	100	83.000.000	
		Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)	Dokumen	2	5.000.000	2	8.000.000	2	10.000.000	2	12.000.000	2	15.000.000	
		Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah	Dokumen	2	8.000.000	2	10.000.000	2	12.000.000	2	15.000.000	2	20.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Kinerja Sekretariat daerah	Dokumen	2	5.000.000	2	10,000,000	2	13.500.000	2	14.383.400	2	21.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Laporan Realisasi, evaluasi dan pelaporan	Dokumen	1	19.765.700	1	19.765.700	1	25.000.000	1	27.000.000	1	27.000.000	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi												
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	153.429.300		100	159.432.600	100	154.965.000	100	170.465.000	100	217.169.400
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Peralatan Listrik/Penerangan Kantor	Jenis	10	1.500.000	10	4.433.000	10	4.433.000	10	8.500.000	10	15.000.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK Sarana Prasarana kantor alat rumah tangga	Jenis	10	53.744.300	10	56.780.000	10	56.780.000	10	56.780.000	10	56.780.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak Penggandaan	Jenis lembar	4 10.000	15.000.000	4 10.000	15.000.000	4 10.000	15.000.000	4 10.000	22.000.000	4 10.000	52.989.400
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan Surat Kabar	Jenis	3	2.400.000	3	2.400.000	3	2.400.000	3	2.400.000	3	2.400.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	penyediaan makan minum perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas luar daerah	Om OP	300 595 4	80.785.000	300 595 4	85.252.600	300 595 4	80.785.000	300 595 4	80.785.000	300 595 4	90.000.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	74.205.700	100	90.670.000	100	90.670.000	100	97.500.000	100	97.500.000	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai buku cek	Lembar buku	30 15	5.000.000	300	3.500.000	300	3.500.000	300	4.000.000	300	4.000.000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	alat kebersihan kantor pemeliharaan peralatan dan mesin	jenis jenis	10 15	4.045.700	10 15	22.010.000	10 15	22.010.000	10 15	23.500.000	10 15	23.500.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Asuransi BPJS Non ASN Asuransi Ketenagakerjaan Non ASN Honorarium Pengelolaan Keuangan Honor Pertanggungjawab Keuangan Jamuan Rapat Laporan Administrasi Umum	OB OB OB OB Dokumen OB	12 12 96 48 30 12	65.160.000	12 12 96 48 30 12	65.160.000	12 12 96 48 30 12	65.160.000	12 12 96 48 30 12	70.000.000	12 12 96 48 30 12	70.000.000
		Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	49.392.100	100	49.392.100	100	49.392.100	100	55.000.000	100	55.000.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	unit unit unit	3 2 5	49.392.100	3 2 5	49.392.100	3 2 5	49.392.100	3 2 5	55.000.000	3 2 5	55.000.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
		an dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perizinan Kendaraan											
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.2. 02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	19.169.808.556	100	19.229.864.106	100	19.399.891.406	100	19.541.489.106	100	19.712.085.106	
		Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	Kali	14	11.549.139.450	14	11.609.195.000	14	11.778.689.000	14	11.918.855.000	14	12.080.951.000	
		Pembayaran TPP	Kali	12	7.606.134.106	12	7.606.134.106	12	7.606.134.106	12	7.606.134.106	12	7.606.134.106	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan pelaksanaan tugas kepegawaian dan barang	Dokumen	3	5.400.000	3	5.400.000	3	5.933.300	3	6.500.000	3	10.000.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen laporan keuangan	Dokumen	85	9.135.000	85	9.135.000	85	9.135.000	85	10.000.000	85	15.000.000	
	Administrasi Kepegawai an Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Persen	100	66.625.000	100	66.625.000	100	66.625.000	100	68.000.000	100	75.000.000	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pemahaman peserta pelatihan/workshop peningkatan manajemen keuangan	Orang	50	66.625.000	50	66.625.000	50	66.625.000	50	68.000.000	50	75.000.000	
			TOTAL		19.551.226.356		19.633.749.506		19.822.043.506		20.000.837.506		20.239.754.506	

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

5. Bagian Adinistrasi Perekonomian

Strategi:

Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Arah Kebijakan:

Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, serta Kebijakan Pendirian BUMD
 Peningkatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil

Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan bidang perhubungan, lingkungan hidup, perumahan permukian.

Urusan:

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan:

Sekretariat Daerah

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIA N DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.2.0 1.01 Koordinasi, Sinkronisa si, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaa n BUMD dan BLUD	Percentase Kajian Kebijakan Perekonomian daerah yang ditindak lanjuti	Persen	100	339.850.000	100	344.234.000	100	348.778.000	100	353.312.000	100	357.834.000
			Capaian pelaksanaan kebijakan perekonomian kabuapten	persen	100	329.850.000	100	334.234.000	100	338.778.000	100	343.312.000	100	347.834.000
			Dokumen Kajian	Dokumen	1	225.137.500	1	225.137.500	1	228.065.500	1	229.065.500	1	230.587.500
			Koordinasi Dana Bergulir	Kegiatan	1		1		1		1		1	
			Koordinasi TPAKD	Laporan	4		4		4		4		4	
			Pelaksanaan Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi BUMD	Kegiatan	1		3		2		1		1	
			Pembinaan BUKP	Laporan	34		34		34		34		34	
			Pembinaan BUMD	Laporan	12		12		12		12		12	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		4.01.03.2.0 1.02 Pengendali an dan Distribusi Perekonom ian	Laporan Monev Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Laporan	2	53.500.000	2	55.884.000	2	57.500.000	2	58.500.000	2	60.000.000
		4.01.03.2.0 1.03 Perencanaaa n dan Pengawasa n Ekonomi Mikro kecil	laporan monev sarana dan prasaranan ekonomi masyarakat	Laporan	2		2		2		2		2	
			Pemahaman peserta workshop kebijakan saranra prasaranan ekonomi masyarakat	orang	50	51.212.500	50	53.212.500	50	53.212.500	50	55.746.500	50	57.246.500
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			100	10.000.000	100	10.000.00 0	100	10.000.00 0	100	10.000.00 0	100	10.000.00 0
		Pengendali an dan Evaluasi Program Pembangun an			1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
					-		-		-		-		-	
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP	Angka	83	366.398.500		83	382.398.500	83	404.398.500	83	440.398.500	83	516.398.500
	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	capaian Kinerja pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	169.570.900		100	178.688.500	100	200.188.500	100	229.688.500	100	267.363.500
	X.XX.01.2. 06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja alat tulis kantor	jenis	53	49.380.900		53	44.588.500	53	56.088.500	54	69.758.500	55	88.963.500
	X.XX.01.2. 06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja cetak	rim	4	25.750.000		5	28.000.000	5	28.000.000	5	28.000.000	5	30.000.000
		Belanja penggandaan	lembar	110000		125000		125000		125000		125000		125000
	X.XX.01.2. 06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	belanja bahan bacaan dan surat kabar	jenis	2	2.400.000		2	2.400.000	2	2.400.000	2	2.400.000	2	2.400.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	perjalanan dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah	OP	684 DD; 9 LD	92.040.000	684 DD; 15 LD	103.700.000	684 DD; 15 LD	113.700.000	684 DD; 18 LD	129.530.000	684 DD; 18 LD	146.000.000
	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan PD	persen	100	121.097.600	100	123.710.000		124.210.000		125.710.000		139.035.000
		X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meterai dan benda pos	lembar	1000	5.050.000	1100	6.050.000	1100	6.050.000	1100	6.050.000	1100	8.000.000
		X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	alat dan bahan kebersihan; servisa dan suku cadang alat kantor	jenis	14 alat dan bahan kebersihan; 4 jenis alat kantor	17.887.600	14 alat dan bahan kebersihan; 4 jenis alat kantor	18.500.000	14 alat dan bahan kebersihan; 4 jenis alat kantor	19.000.000	14 alat dan bahan kebersihan; 4 jenis alat kantor	20.000.000	14 alat dan bahan kebersihan; 4 jenis alat kantor	25.000.000
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan hasil rapat	laporan	30	98.160.000	50	99.160.000	50	99.160.000	60	99.660.000	60	106.035.000
			pengelola keuangan dan barang	orang bulan	132		132		132		132		132	
	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Persen	100	75.730.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	85.000.000	100	110.000.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
	X.XX.01.2. 09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pajak kendaraan; pemeliharaan kendaraan; bbm	unit	6	75.730.000	6	80.000.000	6	80.000.000	6	85.000.000	6	110.000.000	
JULAH TOTAL					706.248.500		726.632.500		753.176.500		793.710.500		874.232.500	

6. Bagian Umum dan Protokol

Strategi:

- Peningkatan kualitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Arah Kebijakan:

- meningkatkan kualitas fasilitasi keprotokolan serta komunikasi pimpinan
- Peningkatan proses kinerja penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta atribut pakaian
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan wakil kepala daerah serta Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Urusan:

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan:

Sekretariat Daerah

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			NILAI AKIP	angka	83	7.850.357.920	83	7.866.357.920	83	7.888.357.920	83	7.924.357.920	83	8.000.357.920
					100	10.000.000	100	16.000.000	100	16.000.000	100	19.000.000	100	25.000.000
	X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rata-rata persentase capaian kinerja aparatur/pegawai (Bagian Umum)	persen										
	X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Pakaian kerja lapangan	Buah	Buah	20	10.000.000	20	16.000.000	20	16.000.000	20	19.000.000	20	25.000.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		Kelengkapanya												
	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administiasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	2.843.033.800		100	2.853.033.800	100	2.863.033.800	100	2.863.033.800	100	2.868.033.800
	X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	Jenis	33	60.000.000	33	70.000.000	33	70.000.000	33	70.000.000	33	75.000.000	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
		X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan Penggandaan	jenis lembar	18 100000	149.118.000								
		X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan perundang-undangan Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis jenis	2 8	42.000.000								
		X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	penyediaan cinderamata penyediaan piala bupati	jenis jenis	3 2	50.000.000	3 2	50.000.000	3 2	60.000.000	3 2	60.000.000	3 2	60.000.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Fasilitasi Acara Lapangan Kebutuhan Logistik Harian Pimpinan Laporan fasilitasi acara lapangan Laporan hasil rapat (makan dan minum rapat) Laporan penerimaan tamu (makan dan minum tamu) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	kali bulan dokumen dokumen op kali	33 12 24 138 200 48 75	1.698.779. 500	33 12 24 138 200 48 75	33 12 24 138 200 48 75	33 12 24 138 200 48 75	33 12 24 138 200 48 75	33 12 24 138 200 48 75	33 12 24 138 200 48 75	1.698.779.500
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	pembayaran honor pengelola kegiatan	OB	84	27.847.900	84	27.847.900	84	27.847.900	84	27.847.900	84	27.847.900

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
					X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	2.026.528.440	100	2.026.528.440	100	2.026.528.440	100	2.059.528.440
					X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos Pengiriman surat-surat dan paroran - laporan	lembar kali	1470 12	18.650.000	1470 12	18.650.000	1470 12	18.650.000	1470 12	18.650.000
					X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening air Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon	bulan	12	167.200.000	12	167.200.000	12	167.200.000	12	200.200.000
					X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Jenis	49	45.570.000	49	45.570.000	49	45.570.000	49	45.570.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Pengaduan Barang dan Jasa Jasa Pengolahan Sampah Laporan Administrasi Umum Laporan Hasil Pengolahan Masakan Laporan Keamanan Monumen Laporan Keamanan Portal Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di Kompleks Parasma mya Laporan	op kali dokumen lokasi bulan kali	2 2 6 4 2 2 8 8 7 1 5 5 3 1 6 3 12 24	2 2 6 4 2 2 8 8 7 1 5 5 3 1 6 3 12 24	2 2 6 4 2 2 8 8 7 1 5 5 3 1 6 3 12 24	2 2 6 4 2 2 8 8 7 1 5 5 3 1 6 3 12 24	2 2 6 4 2 2 8 8 7 1 5 5 3 1 6 3 12 24	2 2 6 4 2 2 8 8 7 1 5 5 3 1 6 3 12 24	2 2 6 4 2 2 8 8 7 1 5 5 3 1 6 3 12 24	2 2 6 4 2 2 8 8 7 1 5 5 3 1 6 3 12 24	1.795.108.440	1.795.108.440	1.795.108.440	1.795.108.440

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
		Lainnya di Rumah Bupati Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di Wakil Bupati Laporan Kegiatan Penyajian Hidangan Untuk Tamu Laporan Pengolahan Gedung												
	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase pemenuhan sarana dan prasarana	persen	100	1.542.906.630	100	1.542.906.630	100	1.542.906.630	100	1.542.906.630	100	1.542.906.630	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
		aparatur (Bag. Umum)												
		X.XX.01.2. 09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bahan bakar dan pelumas Pemeliharaan kendaraan roda 2 Pemeliharaan kendaraan roda 3 Pemeliharaan kendaraan roda 4 Pemeliharaan kendaraan roda 6	liter unit unit unit unit	40000 10 1 23 5	725.089.550								
		X.XX.01.2. 09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak kendaraan bermotor	unit	46	71.950.000	46	71.950.000	46	71.950.000	46	71.950.000	46	71.950.000
		X.XX.01.2. 09.06 Pemeliharaan	Pemeliharaan sarpras dan	jenis	5	76.410.000	5	76.410.000	5	76.410.000	5	76.410.000	5	76.410.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
		Peralatan dan Mesin Lainnya	alat kantor											
		X.XX.01.2. 09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung dan bangunan Sandaran teras bangunan gedung kantor	unit	15	669.457.080	15	669.457.080	15	669.457.080	15	669.457.080	15	669.457.080
		X.XX.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	868.939.800	100	868.939.800	100	880.939.800	100	880.939.800	100	880.939.800
		X.XX.01.2. 11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pembayaran gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	kali	12	168.939.800	12	168.939.800	12	168.939.800	12	168.939.800	12	168.939.800
		X.XX.01.2. 11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pembayaran belanja operasi oanal KDH/W KDH	bulan	12	700.000.000	12	700.000.000	12	712.000.000	12	712.000.000	12	712.000.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		Capaia n Kinerja Admini strasi Keuangan dan Operasi onal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	persen	100	95.000.00 0	100	95.000.00 0	100	95.000.0 00	100	95.000.000	100	110.000.000	
X.XX.01.2.12	Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Pembayaran sewa rumah dinas Wakil Bupati	tahun	1	95.000.000	1	95.000.000	1	95.000.0 00	1	95.000.000	1	110.000.000
		X.XX.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah												
x xx 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Capaia n Kinerja Pelaksa naan Protok ol dan Komun ikasi Pimpin an	persen	100	463.949.2 50	100	463.949.2 50	100	463.949. 250	100	463.949.25 0	100	513.949.250	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
		x xx 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokol an	dokuen	laporan hasil fasilitasi i keproto kolon laporan penerimaan	100	463.949.250	100	463.949.250	100	463.949.250	100	463.949.250	100	513.949.250
JULAH TOTAL					7.850.357.920		7.866.357.920		7.888.357.920		7.924.357.920		8.000.357.920	

7. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Strategi:

Optimalisasi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Arah Kebijakan:

- a) Peningkatan Koordinasi pelaksanaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.
- b) Eningkatkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, serta
- c) Optialisasi Sosialisasi, pendapingan, serta Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Urusan:

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan:

Sekretariat Daerah

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	persen	80	1.095.088.900	80	1.109.216.000	80	1.123.858.000	80	1.138.468.000	80	1.153.040.000	
		Capaian kinerja pengelolaan pengadaan barang dan jasa	persen	100	1.095.088.900	100	1.109.216.000	100	1.123.858.000	100	1.138.468.000	100	1.153.040.000	
		Data Identifikasi kebutuhan barang dan jasa	dokumen	1	965.297.900	1	978.550.000	1	993.192.000	1	1.006.593.000	1	1.021.165.000	
		Laporan administrasi pengadaan barang dan jasa	dokumen	1		1		1		1		1		
		Laporan hasil FGD	dokumen	1		1		1		1		1		
		Laporan hasil pemilihan penyedia barang dan jasa	dokumen	220		220		220		220		220		

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
		4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Laporan diklat SPSE	dokumen	1	79.791.000	1	79.791.000	1	79.791.000	1	81.000.000	1	81.000.000
			Laporan hasil forkom pengadaan barang dan jasa secara elektronik	dokumen	1		1		1		1		1	
			Laporan pelayanan pengadaan elektronik	dokumen	1		1		1		1		1	
			Pengumuman RUP	dokumen	1		1		1		1		1	
		4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pendampingan permasalahan hukum	dokumen	1	50.000.000	1	50.875.000	1	50.875.000	1	50.875.000	1	50.875.000
			Sosialisasi peraturan perundangan PBJ	dokumen	1		1		1		1		1	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Nilai AKIP	Angka	83	472.804.00	83	488.804.00	83	510.804.00	83	546.804.00	83	622.804.00
	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	persentase	100	177.172.00	100	177.472.00	100	177.492.00	100	180.585.00	100	180.820.00
	X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik	jenis	6	1.000.000	6	1.200.000	7	1.200.000	8	1.500.000	8	1.500.000	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
		X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja cetakan	jenis	5	8.765.000	5	8.765.000	5	8.765.000	5	8.765.000	5	9.000.000
			Belanja penggandaan	lembar	22000		23100		25410		26000		28600	
		X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	1	1.200.000	1	1.300.000	1	1.320.000	1	1.320.000	1	1.320.000
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	dokumen	60	166.207.000	60	166.207.000	60	166.207.000	60	169.000.000	60	169.000.000
			Perjalanan dinas luar daerah	op	16		37		43		45		47	
			Perjalanan dalam daerah	op	37		60		60		60		60	
		X.XX.01.2.08.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	199.885.988	100	212.082.000	100	230.812.000	100	253.719.000	100	304.984.000
		X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos	lembar	433	1.500.000	446	1.500.000	459	1.500.000	468	1.500.000	515	1.500.000
		X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran kawat/fax/internet/intranet/Tv kabel/TV	bulan	12	6.000.000	12	6.500.000	12	7.500.000	12	7.500.000	12	7.500.000
			ATK	jenis	30		30		30		30		30	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
		X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bahan dan peralatan kebersihan	jenis	12	43.763.508	12	54.082.000	12	66.812.000	12	84.719.000	12	115.984.000
			Jenis pengadaan peralatan kantor	jenis	4		6		7		8		8	
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor pengelolaan keuangan dan BMD	ob	84	148.622.480	84	150.000.000	84	155.000.000	84	160.000.000	84	180.000.000
			Honor PPKD/PA/KPA	ob	12		12		12		12		12	
			Honor PPTK	ob	36		36		36		36		36	
			Laporan Administrasi pelayanan umum perkantoran	dokumen	1		1		1		1		1	
			Laporan pelayanan informasi kantor	dokumen	1		1		1		1		1	
			Laporan pelayanan ketertiban lingkungan kantor	dokumen	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	95.746.012		99.250.000	100	102.500.000	100	112.500.000	100	137.000.000
		X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	5	71.305.000	5	72.000.000	5	75.000.000	5	84.000.000	5	102.000.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
			Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.09. 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak kendaraan bermotor	unit	7	3.750.000	7	3.750.000	7	4.000.000	7	4.000.000	7	4.000.000
		X.XX.01.2.09. 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Genset	jenis	1		1		1		1		1	
			Pemeliharaan peralatan dan mesin	jenis	5	8.032.500	5	8.500.000	5	8.500.000	5	8.500.000	5	10.000.000
		X.XX.01.2.09. 10 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor	unit	1	12.658.512	1	15.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000
JULAH TOTAL					1.567.892.900		1.598.020.000		1.634.662.000		1.685.272.000		1.775.844.000	

8. Bagian Organisasi

Strategi:

Mewujudkan Penataan Organisasi

Arah Kebijakan:

Penyusunan dan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi serta Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Urusan:

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan:

Sekretariat Daerah

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			Nilai AKIP	angka	83	551.014.000	83	567.014.000	83	589.014.000	83	625.014.000	83	701.014.000
	X.XX.01.2.13 Penataan Organisasi		RightSizing /kesesuaian dg indikator potensi/berman kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan	%	100	240.109.013	100	240.109.013	100	251.109.013	100	269.109.013	100	295.109.013

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
		X.XX.01.2.1 3.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	a. iuran forsesdasi b. dokumen hasil FGD c. Draft Perbub Tambahan Penghasilan Pegawai d. Pemeliharaan aplikasi presensi ASN e. Draft Perbub tentang Analisis Jabatan f. dokumen hasil FGD g. Draft Perbub tentang Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah h. Raperda Pembentukan OPD i. Laporan hasil FGD j. Draft Perbub Eval Tusi OPD k. dokumen hasil rapat l. Draft Perbub Evaluasi Jabatan	kali dokumen dokumen hasil FGD kali dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen	1	165.576.863	1	165.576.863	1	170.576.863	1	176.576.863		186.576.863

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
		X.XX.01.2.1 3.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			1	0	1	0	1	0	1	0		0
		X.XX.01.2.1 3.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	a. dokumen hasil FGD b. dokumen hasil rapat c. Evaluasi pelaksanaan RB	dokumen dokumen dokumen	1	21.306.600	1	21.306.600	1	27.306.600	1	34.306.600		40.306.600

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
		X.XX.01.2.1 3.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	a. Laporan Hasil Rapat b. Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM) c. Dokumen hasil rapat d. Pahaman peserta workshop meningkat sebanyak 80% dari 200 orang e. Janji perbaikan pelayanan publik f. Evaluasi penilaian kinerja pelayanan publik g. dokumen hasil rapat h. Pahaman peserta workshop meningkat sebanyak 80% dari 50 orang i. Pelaksanaan pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat j. Pendampingan penilaian inovasi pelayanan publik se kabupaten Bantul k. Dokumen	dokumen Dokumen dokumen orang dokumen dokumen dokumen orang dokumen dokumen dokumen dokumen kali orang dokumen orang	1	53.225.550	1	53.225.550	1	53.225.550	1	58.225.550		68.225.550

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		hasil rapat l. Dokumen hasil FGD m. Jumlah pameran inovasi n. Pemeliharaan aplikasi sinovik o. Pehaman peserta workshop meningkat sebanyak 80% dari 100 orang p. Standard Operating Prosedur dan Ketatalaksanaan semua OPD q. Pemahaman Peserta Workshop meningkat sebanyak 80% dari 260 peserta												
					X.XX.01.2.1 3.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah									
	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum	Capaian Kinerja Pengelolaan	%	100	222.000.000	100	237.000.000	100	247.000.000	100	259.000.000	100	294.000.000	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)								
Perangkat Daerah		n Administra si Umum												
		X.XX.01.2.0 6.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa n Kantor	-	-	2	15.000.000	3	20.000.000	2	25.000.000	2	27.000.000		33.000.000
		X.XX.01.2.0 6.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah cetakan dan penggandaan	lembar	20.000	5.000.000	20.000	5.000.000	20.000	5.000.000	20.000	5.000.000		7.000.000
		X.XX.01.2.0 6.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	jumlah surat kabar dan buku	Jenis	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000		4.000.000
		X.XX.01.2.0 6.09 Penyelengge raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan dan perjalanan dinas	Dokumen	1	200.000.000	1	210.000.000	1	215.000.000	1	225.000.000		250.000.000
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag.Organisasi)	%	100	20.600.000	100	21.600.000	100	21.600.000	100	24.600.000	100	27.600.000	
		X.XX.01.2.0 8.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	lembar	1	3.100.000	1	3.100.000	1	3.100.000	1	3.100.000		3.100.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAK SANAAN		Prosentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang proporsional	%	%	88	200.000.000	88.5	650.000.000	89	300.000.000	89.5	300.000.000	90	600.000.000
					81	150.000.000	82	200.000.000	83	230.000.000	84	245.000.000	85	350.000.000
	4.01.04.2.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	%	%	100	200.000.000	100	650.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	250.000.000
					4.01.04.2.0 1.06 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	Dokumen	1	200.000.000	1	650.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000
	4.01.04.2.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	%	%	81	150.000.000	82	200.000.000	83	230.000.000	84	245.000.000	85	250.000.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		4.01.04.2.0 2.04 Implementasi Budaya Pemerintahan Bantul	1. Rencana Aksi (Action Plan) tentang Budaya Pemerintahan 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan 3. Agen Perubahan Kelompok Budaya Pemerintahan 4. Draft Perbub Pakaian Dinas 5. Pin satriya	Dokumen	1	150.000.000	1	200.000.000	1	230.000.000	1	245.000.000	1	250.000.000
JULAH TOTAL						901.014.000		1.417.014.000		1.119.014.000		1.170.014.000		1.301.014.000

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Indikator Kinerja						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83	83	83	83	83	83	83	83
	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								
	Prosentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %
	Prosentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Prosentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindak Lanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								
	Per sentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan Metode Tender	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN								
	Prosentase dukungan terhadap	0	87,5 %	88 %	88,5 %	89 %	89,5 %	89,5 %	89,5 %

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Indikator Kinerja						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Kelembagaan yang Proposional								
	Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan	87,5 %	88 %	88,5 %	89 %	89,5 %	90 %	90 %	
	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	87,5 %	88 %	88,5 %	89 %	89,5 %	90 %	90 %	
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul	80,5 %	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %	85 %	

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, 2021

BAB VIII.

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang terukur, berkesinambungan, realistik, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Rencana Strategis ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, yaitu sejak Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah setelah penetapan. antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Sekretariat Daerah dan RKA Sekretariat Daerah tahun 2022 sampai dengan 2026.
- c. Sekretaris Daerah bersama seluruh Kepala Bagian melakukan evaluasi hasil Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Rencana Kerja Sekretariat Daerah secara periodik.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Sekretariat Daerah beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bantul, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Bantul, September 2021
Sekretaris Daerah,

.....